

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Provinsi DKI Jakarta

Secara garis besar, DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Terletak di bagian barat laut Pulau Jawa, wilayah ini termasuk salah satu dari 34 provinsi di Indonesia. Menurut data dari BPS pada tahun 2020 DKI Jakarta mempunyai lima kota administratif, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Luas provinsi ini sekitar 664,01 km² dengan populasi sekitar 10,56 juta orang.

Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk perekonomian, politik, budaya, dan sosial. Wilayah ini merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang penting, dengan sejumlah besar perusahaan nasional dan internasional yang beroperasi di sana. Jakarta juga memiliki infrastruktur yang baik, seperti bandara internasional, pelabuhan laut, sistem transportasi yang luas, dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Namun, Provinsi DKI Jakarta juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah sosial, termasuk isu pengungsi asing. Sebagai ibu kota yang ramai dan pusat aktivitas ekonomi, Jakarta menjadi tujuan bagi sejumlah besar orang, termasuk pengungsi asing yang mencari perlindungan, pekerjaan, atau peluang lainnya. Wilayah DKI Jakarta menjadi fokus studi kasus dalam skripsi ini, karena daerah tersebut diketahui sebagai tempat tinggal sementara bagi gelandangan asing.

Jakarta Pusat adalah salah satu wilayah administratif di DKI Jakarta dan menjadi lokasi dari penelitian ini. Wilayah ini memiliki luas sekitar 48,13 km² dan penduduk sekitar 1,1 juta jiwa (berdasarkan data tahun 2020). Kebon Sirih adalah salah satu kelurahan di Jakarta Pusat yang menjadi lokasi penelitian ini.

Kebon Sirih terletak di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Wilayah ini memiliki luas sekitar 0,85 km² dan penduduk sekitar 13.500 jiwa (berdasarkan data tahun 2020). Wilayah ini terkenal sebagai lokasi pengungsian bagi para pengungsi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia maupun negara lain.

Konteks peran dalam pemerintah provinsi, penelitian ini akan membahas upaya dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pengungsi asing di wilayahnya. Melalui studi kasus di jalanan Kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, penulis akan menganalisis peran pemerintah dalam menyediakan bantuan kemanusiaan, akses ke layanan dasar, perlindungan hukum, dan integrasi sosial bagi pengungsi asing yang tinggal di wilayah tersebut.

Sebagai wilayah ibu kota negara Indonesia, DKI Jakarta memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani para pengungsi. Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) merupakan dua lembaga yang memiliki peranan penting dalam menangani para pengungsi yang tinggal di wilayah tersebut. Melalui berbagai program dan kegiatan, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan UNHCR berusaha untuk mengisi kebutuhan dasar para pengungsi seperti tempat tinggal, pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Kota/Kabupaten Administrasi	Luas Area (km ²)	Jumlah			
		Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
Jakarta Pusat	48,13	8	44	393	4.710
Jakarta Utara	146,66	6	31	448	5.239
Jakarta Barat	129,54	8	56	584	6.495
Jakarta Selatan	141,27	10	65	582	6.164
Jakarta Timur	188,08	10	65	707	7.952
Kepulauan Seribu	8,70	2	6	24	127
Jumlah	662,33	44	267	2.738	30.687

Sumber: RPJMD DKI Jakarta Tahun 2018-2022

2.2 Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta adalah sebuah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, dan kebijakan politik di wilayah provinsi DKI Jakarta. Lembaga ini dinaungi oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dalam konteks penanganan pengungsi asing di Jakarta, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta memiliki peran penting dalam memfasilitasi koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan berbagai lembaga terkait lainnya seperti UNHCR. Kesbangpol juga memiliki peran dalam melaksanakan pengamatan dan evaluasi pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam penanganan pengungsi, serta memfasilitasi komunikasi antara gelandangan asing dengan pihak-pihak terkait.

Selain itu, Kesbangpol juga berperan dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal membangun kesadaran untuk menjaga kerukunan sosial dan menghindari konflik antara masyarakat dan pengungsi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap para gelandangan asing.

Dalam konteks penanganan pengungsi asing di Jakarta, UNHCR juga memiliki peran penting sebagai lembaga internasional yang fokus pada perlindungan dan bantuan bagi para pengungsi. UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi para pengungsi, termasuk di wilayah Jakarta

Dalam studi kasus ini, peran pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menangani pengungsi asing di Jakarta menjadi fokus utama. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam penanganan pengungsi, Kesbangpol Provinsi DKI

Jakarta diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi para pengungsi, serta meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

2.3 SATPOL PP Provinsi DKI Jakarta

Sebagai bagian dari tugasnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah provinsi DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam menangani para pengungsi asing di wilayah tersebut. Satpol PP dapat digambarkan merupakan pihak yang terlibat dalam penanganan pengungsi asing di Jakarta.

Satpol PP DKI Jakarta memiliki tugas dan wewenang dalam penegakan peraturan daerah, termasuk dalam hal penanggulangan pengemis dan gelandangan serta penanganan keamanan dan ketertiban umum di wilayah provinsi. Dalam konteks penanganan gelandangan asing, Satpol PP berperan dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas para gelandangan asing di wilayah tersebut, serta melakukan tindakan jika terjadi pelanggaran hukum atau gangguan terhadap ketertiban umum. Dalam kasus pengungsi asing yang berada di Jakarta, Satpol PP juga dapat melakukan tindakan penertiban terhadap para pengungsi yang menempati area pinggir jalan atau tempat umum lainnya yang tidak diizinkan. Selain itu, Satpol PP juga dapat membantu dalam mengamankan area tersebut agar tidak terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan yang merugikan masyarakat sekitar.

Meskipun begitu, Satpol PP harus memastikan bahwa penanganan terhadap para pengungsi dilakukan secara manusiawi dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Satpol PP perlu bekerja sama dengan pihak terkait lainnya, seperti Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada orang asing yang menjadi gelandangan dan

membutuhkan bantuan. Satpol PP DKI Jakarta memiliki peran yang penting dalam menangani pengungsi asing di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Satpol PP harus menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik untuk membantu mewujudkan wilayah yang aman dan kondusif bagi masyarakat, termasuk pengungsi yang membutuhkan bantuan dan perlindungan.

2.5 Keputusan Gubernur Nomor 1550 Tahun 2021

“KEPUTUSAN GUBERNUR NO 1550 TAHUN 2021 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGI DARI LUAR NEGERI TINGKAT PROVINSI”

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1550 Tahun 2021 yang mengatur tentang satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri di tingkat provinsi. Tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan pengungsi dari luar negeri yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu "Peranan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pengungsi asing" Keputusan Gubernur nomor 1550 tahun 2021 menjadi penting dalam menunjang upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menangani para pengungsi yang tinggal di kawasan tersebut.

Keputusan gubernur tersebut membentuk satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri tingkat provinsi yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan sinergi antar instansi dalam menangani masalah pengungsi. Satuan tugas ini terdiri dari beberapa instansi, antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan ini dapat dijelaskan bahwa peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat penting dalam menangani para pengungsi pinggir jalan yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dan UNHCR bekerja sama untuk menyediakan tempat tinggal sementara, pendidikan, kesehatan, dan pangan bagi para pengungsi.

Dengan adanya keputusan gubernur nomor 1550 tahun 2021 tentang satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri tingkat provinsi, diharapkan koordinasi dan sinergi antar instansi dapat lebih terencana dan terkoordinasi dengan baik, sehingga upaya menangani masalah pengungsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Kesimpulan dari Keputusan Gubernur Nomor 1550 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri tingkat provinsi adalah:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui adanya masalah pengungsi dari luar negeri yang tinggal di wilayah mereka dan mengambil langkah untuk menanganinya. Keputusan gubernur ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini.
2. Keputusan gubernur ini penting dalam konteks penelitian mengenai peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pengungsi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ini menunjukkan relevansi kebijakan tersebut dengan fokus penelitian tersebut.
3. Satuan tugas yang dibentuk oleh keputusan gubernur ini memiliki peran utama dalam melakukan koordinasi dan sinergi antar instansi terkait untuk menangani masalah pengungsi. Dengan adanya satuan tugas ini, diharapkan penanganan pengungsi dapat dilakukan secara lebih terencana dan terkoordinasi dengan baik.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan UNHCR untuk menyediakan tempat tinggal sementara, pendidikan, kesehatan, dan pangan bagi para pengungsi. Hal ini menunjukkan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah dan lembaga internasional dalam menangani masalah pengungsi.

5. Keputusan gubernur ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani masalah pengungsi. Dengan adanya koordinasi dan sinergi antar instansi yang lebih baik, diharapkan upaya penanganan pengungsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, keputusan gubernur ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani masalah pengungsi dari luar negeri dan mengkoordinasikan upaya penanganan secara lebih baik.